



IMPLEMENTASI INAPORTNET TERHADAP PELAYANAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR DI KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV SELATPANJANG

M. Adil Syah¹, Romanda Annas Amrullah², Eka Nurmala Sari Agustina³, Bugi Nugraha⁴

¹⁻⁴Politeknik Pelayaran Surabaya, Indonesia

*Email Korespondensi : adilsyah16@gmail.com

Alamat : Jl. Gunung Anyar Lor, No. 1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur
60294, Indonesia

Korespondensi penulis: adilsyah16@gmail.com

***Abstract** This study analyzes the implementation of the Inaportnet system in improving the efficiency of Port Clearance (services at the Class IV Harbourmaster and Port Authority Office (KSOP) in Selatpanjang. The research employs a descriptive qualitative approach with data collected through observation, interviews, and documentation. The findings reveal that although the implementation of Inaportnet has facilitated the service process, several obstacles persist, such as limited internet connectivity, incomplete vessel documentation, and a lack of understanding among shipping agents regarding the system's procedures. This study recommends the enhancement of information technology infrastructure, continuous training for human resources, and improved inter-agency coordination to optimize SPB services through Inaportnet.*

Keywords: Harbourmaster and Port Authority, Inaportnet, Port Clearance, Service Efficiency

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem Inaportnet dalam meningkatkan efisiensi pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di Kantor KSOP Kelas IV Selatpanjang. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun implementasi Inaportnet memberikan kemudahan dalam pelayanan, beberapa kendala masih ditemukan seperti keterbatasan jaringan internet, ketidaklengkapan dokumen kapal, serta kurangnya pemahaman agen pelayaran dalam menggunakan sistem. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan infrastruktur teknologi informasi dan pelatihan berkelanjutan bagi SDM serta koordinasi antarlembaga untuk optimalisasi layanan SPB melalui Inaportnet.

Kata Kunci:: Inaportnet, KSOP, Pelayanan Digital, Surat Persetujuan Berlayar

1. LATAR BELAKANG

Ada banyak pelabuhan di Indonesia, salah satunya di Selatpanjang. Yang mana didalamnya terdapat jasa usaha kepelabuhanan yang berkaitan dengan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, ketertiban arus lalu lintas atau trafik (kapal, penumpang dan/atau kargo). (Djamaluddin, 2022)

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pelabuhan menegaskan tentang setiap pelabuhan harus memiliki Rencana Induk Pelabuhan (RIP) yang telah disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor. RIP ini mencakup Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN), Rencana Wilayah, Rencana Wilayah Administrasi/Kota, serta memperhatikan keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan yang terkait dengan lokasi pelabuhan lainnya. Selain itu, RIP juga mempertimbangkan kelayakan teknis, ekonomi, lingkungan, serta aspek keamanan dan keselamatan kapal. (Romanda, 2020) Angkutan di perairan mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri yang perlu dikembangkan karena mampu mengangkut barang dalam jumlah besar dengan biaya yang lebih rendah dengan memperhatikan sifat sarananya yang padat modal, serta mampu menggunakan teknologi maju. (Ilham, 2022).

Kemajuan dan perkembangan kehidupan dan juga arus barang dan kapal dari luar negeri maupun dalam negeri yang tiba di kawasan pelabuhan semakin meningkat menyebabkan beroperasinya dan penggunaan sistem aplikasi Inaportnet agar memberikan pelayanan yang maksimal. Dalam pengisian dokumen pelayaran melalui sistem online, seperti sistem Inaportnet, masih perlu dilakukan pembenahan kesalahan administrasi yang masih membutuhkan aplikasi tambahan untuk memastikan koneksi antara instansi terkait dengan perusahaan pelayaran. Perubahan tata cara pengisian dokumen melalui sistem online, dimana tidak boleh ada pertemuan tatap muka antara pengguna jasa dengan penyedia jasa, akan memiliki dampak pada keterlambatan penerbitan izin.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan Inaportnet, sebuah sistem layanan berbasis internet yang mengintegrasikan informasi kepelabuhanan standar dari berbagai instansi dan pemangku kepentingan di pelabuhan.

Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri, memperkuat penelitian kelautan berteknologi tinggi, dan meningkatkan pendapatan industri maritim. Salah satu kendala yang dihadapi saat pengisian dokumen melalui sistem yaitu kendala teknis sistem Inaportnet yang terkadang sering *down* ataupun *maintenance* pada jam sibuk, kelengkapan dokumen pengiriman, kurangnya pemahaman tentang cara pengisian dokumen pengiriman, sehingga memakan waktu dalam pengisian dokumen pengiriman. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam penanganan perizinan yang berdampak pada keterlambatan keberangkatan kapal.

Dengan alasan tersebut, penulis mengangkat judul, “IMPLEMENTASI INAPORTNET TERHADAP PELAYANAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR DI KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV SELATPANJANG”

2. KAJIAN TEORITIS

Penyelenggaraan Jasa Kepelabuhanan

Penyelenggaraan jasa kepelabuhanan berdasarkan aspek kelembagaan dapat dibedakan tugas pemerintah yaitu Lembaga Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan didirikan sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas keamanan dan pengawasanyang dipimpin oleh Syahbandar bersama dengan unsur-unsur kelaiklautan laut, kepelautan, laik laut, serta ketertiban dan patroli kapal. (Karso, 2021)

Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Surat Persetujuan Berlayar merupakan dokumen yang dikeluarkan Syahbandar kepada setiap kapal yang ingin meninggalkan pelabuhan setelah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar merupakan tindakan pengawasan yang dilakukan oleh pihak Syahbandar berdasarkan surat pernyataan dari nakhoda bagi setiap kapal yang akan berlayar (PM 82 tahun 2014 pasal 1 ayat 1).

Penerapan Inaportnet terhadap layanan kapal dan barang di pelabuhan dilakukan dengan sesuai tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing badan pemerintah atau stakeholder di pelabuhan sesuai dengan undang-undang. Dengan bantuan sistem Inaportnet, layanan pelayaran di pelabuhan akan diperluas dan operasi yang ada di pelabuhan akan disederhanakan, sehingga biaya logistik dapat ditekan dan juga

pelabuhan dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Inaportnet sendiri ditujukan bagi pelayanan kapal dan barang, yang meliputi kedatangan kapal, kapal pindah, perpanjangan tambat dan pembatalan layanan. (Biro Komunikasi dan Informasi Publik, 2021)

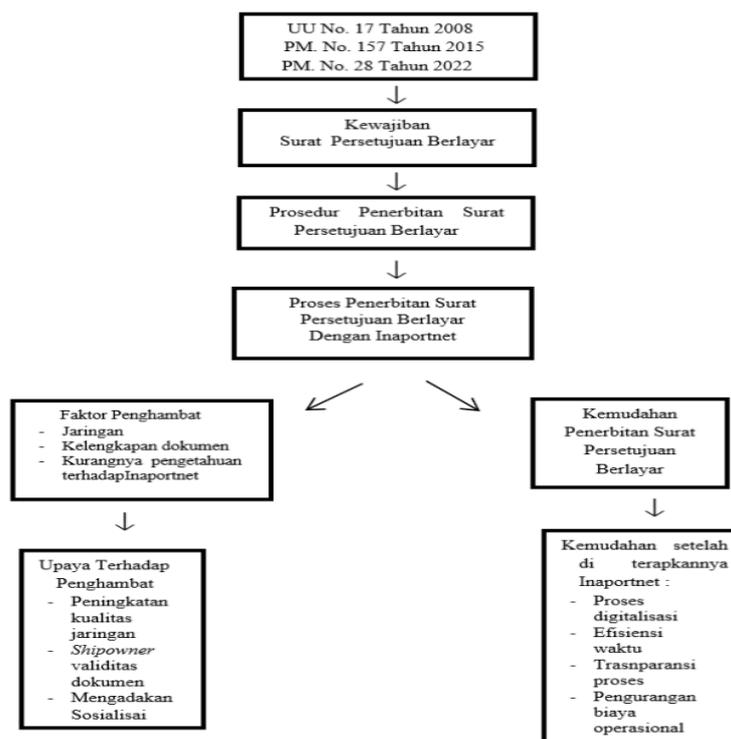
Inaportnet

Penerapan Inaportnet terhadap layanan kapal dan barang di pelabuhan dilakukan dengan sesuai tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing badan pemerintah atau stakeholder di pelabuhan sesuai dengan undang-undang. Dengan bantuan sistem Inaportnet, layanan pelayaran di pelabuhan akan diperluas dan operasi yang ada di pelabuhan akan disederhanakan, sehingga biaya logistik dapat ditekan dan juga pelabuhan dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Inaportnet sendiri ditujukan bagi pelayanan kapal dan barang, yang meliputi kedatangan kapal, kapal pindah, perpanjangan tambat dan pembatalan layanan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk Menganalisis Implementasi Aplikasi Inaportnet Terhadap Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selatpanjang. Penelitian ini dilaksanakan pada saat peneliti melaksanakan Praktek Darat (Prada) di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selatpanjang yang terhitung dari tanggal 1 Agustus 2023 hingga 1 Agustus 2024.

Kerangka Penelitian



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Setiap kapal yang akan melaksanakan kegiatan pelayaran, wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. Apabila dalam setiap hari terdapat banyak kapal yang akan melakukan pelayaran, maka betapa sibuk Kantor Kesyahbandaran melakukan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. Mengatasi hal ini, maka Pemerintah menginisiasi untuk membangun sebuah aplikasi, yakni Inaportnet yang antara lain digunakan oleh menunjang kelancaran dan kemudahan proses penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut merupakan hasil dan pembahasan yang dilakukan penulis.

a. Peningkatan Jumlah Penerbitan SPB

Data menunjukkan adanya peningkatan jumlah penerbitan SPB pasca-implementasi Inaportnet. Berdasarkan dokumentasi di KSOP Selatpanjang, pada bulan Agustus hingga Desember 2023, telah diterbitkan sebanyak 2.208 SPB, dengan rata-rata 441 SPB per bulan. Sementara itu, pada Januari hingga Juni 2024, jumlah SPB yang diterbitkan

mencapai 5.829 SPB, dengan rata-rata 971 SPB per bulan. Angka ini menunjukkan adanya lonjakan permintaan terhadap layanan penerbitan SPB, sekaligus menandakan bahwa proses pelayanan melalui sistem Inaportnet memberikan dampak positif terhadap efisiensi dan kecepatan layanan.

b. Kendala dalam Implementasi Inaportnet

Digitalisasi ini juga membawa konsistensi waktu penerbitan SPB. Jika sebelumnya durasi bervariasi dan tidak pasti, kini Inaportnet menstandarisasi waktu menjadi 10-120 menit, dengan rata-rata turun dari 60-120 menit menjadi 20-40 menit, meningkatkan kepastian perencanaan operasional kapal. Dampak positif dirasakan baik oleh pemohon (fleksibilitas dan kenyamanan) maupun petugas KSOP (verifikasi otomatis dan efisiensi penanganan permohonan).

Hasil wawancara dengan petugas KSOP dan agen pelayaran mengungkapkan beberapa kendala yang masih dihadapi:

- 1) Jaringan internet tidak stabil, terutama saat jam sibuk, menyebabkan gangguan dalam akses sistem dan keterlambatan penerbitan SPB.
- 2) Kurangnya pemahaman agen pelayaran, terutama bagi operator baru, dalam menjalankan tahapan pengajuan SPB melalui aplikasi Inaportnet.
- 3) Ketidaksesuaian dokumen seperti crew list, surat ukur, atau data kapal yang tidak diperbarui, sehingga memerlukan koreksi berulang.
- 4) Koordinasi antarlembaga yang belum optimal, seperti keterlambatan persetujuan dari instansi seperti Imigrasi atau Karantina yang turut terintegrasi dalam sistem.

c. Upaya Perbaikan

Upaya yang telah dan sedang dilakukan di KSOP Selatpanjang dalam meningkatkan implementasi Inaportnet antara lain:

- 1) Pelatihan dan sosialisasi berkala kepada agen pelayaran mengenai tata cara penggunaan sistem Inaportnet, termasuk simulasi pengajuan SPB.
- 2) Penambahan infrastruktur teknologi informasi seperti perangkat komputer, jaringan internet cadangan, dan petugas teknis pendukung.
- 3) Penyusunan SOP kontingensi untuk penanganan ketika sistem Inaportnet mengalami gangguan, termasuk alternatif layanan manual yang tetap terdokumentasi secara digital.

- 4) Evaluasi layanan secara berkala, melalui forum pengguna jasa pelabuhan yang melibatkan stakeholder seperti Pelindo, Karantina, dan Bea Cukai.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi Inaportnet di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selatpanjang telah memberikan dampak positif terhadap efisiensi pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah SPB yang diterbitkan secara signifikan dan waktu layanan yang lebih cepat serta terdigitalisasi. Inaportnet membantu meminimalisir prosedur birokrasi manual. Namun masih terdapat kendala dalam proses penerbitan Surat Persetujuan Belayar dengan menggunakan aplikasi Inaportnet pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selatpanjang, yakni kendala teknis seperti *server down* ataupun *maintenance*, dokumen tidak lengkap atau *expired*, dan SDM yang belum familiar dengan aplikasi Inaportnet. Oleh karena itu, meskipun efektivitas sistem terbukti, optimalisasi penuh masih memerlukan perhatian khusus.

Berdasarkan penelitian ini, untuk mengoptimalkan implementasi Inaportnet ke depannya *server* Inaportnet pusat harus dioptimalkan terutama pada jam sibuk sehingga dapat meminimalisir keterlambatan pengurusan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. Selain itu, pelatihan teknis secara rutin bagi agen pelayaran dan petugas internal sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan sistem, sehingga dapat meminimalkan kesalahan input serta mempercepat proses layanan. KSOP juga perlu menyusun prosedur darurat (SOP kontingensi) untuk menjaga keberlangsungan layanan ketika sistem mengalami gangguan. Di sisi lain, koordinasi lintas instansi seperti Imigrasi, Karantina, dan Bea Cukai harus diperkuat agar proses verifikasi dokumen dapat dilakukan secara cepat dan efisien. Evaluasi dan monitoring kinerja sistem serta tingkat kepuasan pengguna jasa juga sebaiknya dilakukan secara berkala agar mutu layanan terus meningkat. Dengan pelaksanaan langkah-langkah tersebut, diharapkan Inaportnet dapat berjalan secara optimal dan mendukung pelayanan kepelabuhanan yang lebih modern, transparan, dan akuntabel.

DAFTAR REFERENSI

- Biro Komunikasi dan Informasi Publik. (2021). *Inaportnet, Sistem Informasi Standar Pelayanan Kapal dan Barang (online)*. Biro Komunikasi Dan Informasi Publik. <https://dephub.go.id/post/read/inaportnet,-sistem-informasi-standar-pelayanan-kapal-dan-barang>. Diakses pada tanggal 11 November 2023.
- Djamaluddin, A. (2022). *Manajemen Operasional Pelabuhan*. Unhas Press.
- Ilham, C. I. (2022). *Teknis Evaluasi Kinerja Dan Fasilitas Pelabuhan Sungai Danau Dan Penyeberangan*. Adab.
- Karso, A. J. (2021). *Implementasi Kebijakan Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Sebagai Kepala Pemerintahan Di Pelabuhan Guna Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Secara Profesional Dan Akuntabel Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Lingkungan Kepelabuhan*. Insania.
- Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia. (2014). *Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. Nomor PM. 82 Tahun 2014*.
- Romanda, A. A. (2020). *Pelabuhan Dan Serba-Serbinya (Bisnis, Jasa & Fasilitas)*. Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.